

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) LEBIH DARI  
5 BIDANG TAPAK KAVLING**



Oleh :

**GESANG ISWAHYUDI**

**NIM : 12216033**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2018**

TESIS

**AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) LEBIH DARI 5  
BIDANG TAPAK KAVLING**

The logo of Universitas Narotama Surabaya is a large, circular emblem. It features a yellow outer ring with the text "UNIVERSITAS NAROTAMA" at the top and "SURABAYA" at the bottom in blue capital letters. Inside the ring is a blue shield-like shape containing a stylized white and yellow building. Below the building, the text "Oleh : GESANG ISWAHYUDI NIM : 12216033" is written in black. The entire logo is centered on the page.

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama  
Surabaya**

**Oleh :**

**GESANG ISWAHYUDI  
NIM : 12216033**

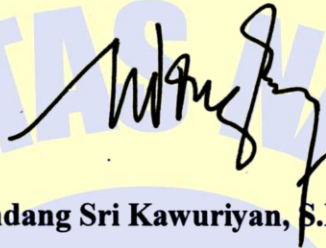
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2018**

**Lembar Pengesahan**

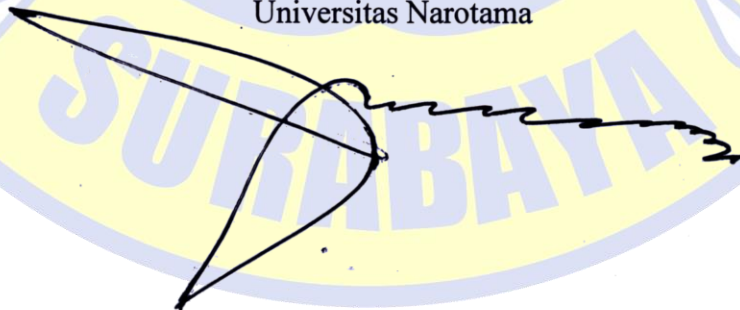
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL

Oleh Dosen Pembimbing :



**Dr. Endang Sri Kawuriyan, S.H., M.H**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Narotama



**Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TESIS INI TELAH DIREVISI**  
**PADA TANGGAL 27 Agustus 2018**

**Oleh Dosen Pembimbing :**



**Dr. ENDANG SRI KAWURYAN, S.H, M. Hum.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**  
**Universitas Narotama**



**Dr. HABIB ADJIE, S.H., M. Hum.**



## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi serta memahami batasan kepemilikan hak milik lebih dari 5(lima) bidang tanah yang terkait tapak kavling. Negara mengatur kepemilikan tanah dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM), dimana masyarakat hanya boleh memiliki maksimal 5 (lima) bidang saja atau dengan luas keseluruhan kepemilikan SHM tersebut tidak lebih dari 5000 m<sup>2</sup> (Lima ribu meter persegi) serta Bahwa pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana yang di amanatkan oleh pasal 7, pasal 17 dalam hal ini mengenai hak milik non pertanian sampai saat ini belum ada pembatasannya atau belum ada peraturan yang mengatur mengenai batas maksimum tanah hak milik non pertanian. Pengaturan tentang hal ini seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998, tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Dasar pelaksanaan risalah pertimbangan tapak kavling adalah peraturan kepala BPN RI no. 1 Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010. Hasil dari penulisan ini adalah Agar tercapai apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 maka bpn dalam hal ini harus mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan tanah hak milik non pertanian yang lebih komperhensif dan utuh agar dapat mencegah dan menindak apabila ada golongan atau pihak-pihak yang menumpuk tanah-tanah hak milik non pertanian, sebaiknya membentuk peraturan yang mengatur pembatasan hak milik non pertanian memiliki rumusan-rumusanyang sama dengan ketentuan pembatasan mengenai tanah tersebut, misalnya membagi kategori tanah hak milik non pertanian berdasarkan wilayah strategis atau tidak strategis serta agar perorangan serta badan

pertanahan nasional (BPN) dapat saling memperhatikan batasan kepemilikan oleh seseorang terhadap tanah hak miliknya, sehingga dapat terlaksananya program *landreform* serta memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang ditelah diharapkan, dalam kaitannya dengan pemanfaatan tata ruang kota, rencana tapak merupakan salah satu alat pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang kota, dan sebagai pendorong pengembangan wilayah secara optimal, karena rencana tapak memuat pedoman dasar bagi perencanaan kawasan, perencanaan bangunan, pengelola kawasan, pemilik bangunan, pengguna atau penghuni serta pihak lain yang terkait dengan kawasan di dalam menyusun dan menata suatu bagian kawasan yang bersifat operasional dan mengikat. untuk menyelesaikan permasalahan ini jalan yang bisa ditempuh oleh si pemilik/perorangan jika ingin mengajukan pemecahan sertifikat sesuai dengan keinginannya (walaupun lebih dari 5 bidang) adalah dengan mengajukan pemecahan sertifikat serta mengajukan proses tapak kavling ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

**Kata kunci** : landreform, Batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah, tapak kavling.

## ABSTRACT

Purpose of this paper is to determine the existence and understand the limitations of property ownership of more than 5 (five ) parcel of land plots relating to the site. State regulating land ownership with the status Certificate of Land Ownership (SHM), where people can only have a maximum of five (5) areas, or the total area of the SHM ownership of no more than 5000 m<sup>2</sup> (Five thousand square meters) and That restrictions on land ownership as mandated by Article 7, Article 17 in this case regarding non-agricultural property till now there is no restriction, or no regulation concerning the maximum limit of non-agricultural land property rights. The setting of this case as stated in the Decree of the State Minister of Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 6 of 1998 on the Granting of Property Rights to Land for House Live. Basic implementation is the treatise consideration plots tread head of BPN RI regulation no. 1 In 2010, dated January 25, 2010. The results of this paper are In order to achieve what is set forth in article 33, paragraph 3 of the Constitution in 1945 the BPN in this case must issue rules concerning restrictions on non-agricultural land property rights more comprehensive and complete in order to prevent and take action if there are groups or parties that accumulate land property rights of nonagricultural, should establish regulations governing the restriction of property rights of nonagricultural formulated-rumusanyang together with the provisions of the restrictions on the land, for example, divide the category of land property rights of non agriculture based strategic area or is not strategic and so that individuals and entities the national land (BPN) to each of limitations of ownership by a person to land his property, so can the implementation of landreform and enacting Law No. 5 of 1960 on Basic Regulation of Agrarian (Basic Agrarian Law) ditelah expected, in relation to the utilization of city planning, site plans is one means of controlling and regulating the use of urban space, and as a driver of regional development optimally, due to site plan contains basic guidelines for area planning, construction planning, area managers, building owners, users or occupant as well as the others associated with the region in preparing and managing a regional part of an operational nature and binding. to resolve this matter roads that can be taken by the owner / individual if you want to file a certificate solution in accordance with his wishes (although more than 5 fields) is to submit a certificate as well as propose the process of solving the tread plots to the National Land Agency (BPN).

**Keywords:** land reform, the minimum and maximum land holdings, treads plots.



## DAFTAR ISI TESIS

Halaman Ulasan Seminar Hasil.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Lembar Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi Proposal.....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	8
4.1.1 Manfaat Teoritis.....	8
4.1.2 Manfaat Praktis.....	8
5. Originalitas Penelitian.....	8
6. Tinjauan Pustaka.....	11
A.Teori Keadilan.....	12
B.Teori Kewenangan.....	12
C.Prinsip Equality.....	15
7. Metode Penelitian.....	17
7.1. Tipe Penelitian.....	17
7.2. Pendekatan Masalah.....	17
7.2.1. Pendekatan Undang-Undang( <i>Statue Approach</i> ).....	17
7.2.2. Pendekatan Konseptual( <i>Conceptual Approach</i> ).....	17
7.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
6.3.1. Bahan Hukum Primer.....	18
6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	18
7.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	19
7.5. Analisis Bahan Hukum .....	19
8. Sistematika Penulisan.....	19



## **BAB II**

TANAH SEBAGAI SUATU SISTEM.....	20
2.1 Pengertian Tanah Dan Esensinya.....	22
2.2 Undang-Undang Pokok Agraria Dan Hak Penguasaan Atas Tanah.....	27
2.3 Landreform.....	31
2.4 Redistribusi.....	35
2.5 Hak Milik.....	36
2.6 Tanah Pertanian.....	37
2.7 Tanah Absentee.....	39

## **BAB III**

Batas Minimum Dan Maksimum Kepemilikan Tanah Pertanian Dan Non Pertanian.....	44
3.1 Batas Minimum.....	44
3.2 Batas Maksimum.....	45
3.3 Tata Cara Memperoleh Tanah.....	46
3.4 Pendaftaran Tanah.....	49
3.5 Tinjauan Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah.....	58
3.6 Pengertian Tapak Kavling.....	62
3.7 Pemecahan Bidang Tanah.....	64
3.8 Rencana Tapak Merupakan Bagian Dari Tata Ruang Kota.....	64
3.9 Tapak Kavling Merupakan Diskresi.....	66
3.10 Problematika Hukum Dalam Tapak Kavling Dan Peralihan Hak Atas Tanah .....	67
3.11 ruang lingkup ijin lokasi, tata ruang, advice planning, dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT).....	75
3.11.1 Pengertian Dan Ruang Lingkup Izin.....	75
3.11.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Tata Ruang.....	76
3.11.3 Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang.....	83
3.11.4 Advice Planning.....	86
3.11.5 Site plan dan rencana tapak.....	89
3.11.6 ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT).....	90

#### **BAB IV**

PENUTUP.....	92
Kesimpulan.....	92
Saran .....	94

#### **Daftar Pustaka**



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pembatasan kepemilikan tanah sebagaimana yang di amanatkan oleh pasal 7, pasal 17 UUPA dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.6 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN) RI no. 1 Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010 dalam hal ini mengenai hak milik non pertanian sampai saat ini belum ada pembatasannya atau belum ada peraturan yang mengatur mengenai batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian, bahwa pembatasan harus segera dilakukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam waktu secepatnya, agar tidak menimbulkan penumpukan tanah pada satu golongan ataupun yang sering disebut tuan tanah yang dapat mengakibatkan monopoli dibidang pertanahan dan pembatasan pemilikan tanah adalah salah satu solusinya.
2. Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1998 dan Peraturan Kepala BPN RI no. 1 Tahun 2010, Tanggal 25 Januari 2010 dalam hal ini bukan merupakan pembatasan yang secara utuh tetapi melainkan hanya kebijakan yang secara atribusi terhadap pelaksana oleh undang-undang dan untuk pemerintah daerah terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembatasan terhadap permohonan hak atas tanah Negara yang diperuntukkan sebagai rumah tinggal serta hanya pembatasan pemecahan bidang tanah oleh perorangan saja.

3. Bahwa Rencana Tapak juga digunakan Pemerintah Kota untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kepemilikan perorangan melalui proses pemecahan bidangnya yang disesuaikan antara rencana pemanfaatan ruang oleh pihak perorangan atau badan hukum dengan rencana tata ruang wilayah kota. Adapun sanksi terhadap kepemilikan yang melampaui batas sebenarnya telah ada, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 Undang-Undang no.56 Prp Tahun 1960. Tetapi yang mengherankan adalah dimana sanksi telah ada namun peraturan yang dapat mengakibatkan dikenakan sanksi tersebut sampai saat ini belum ada atau belum diatur.

Dalam hal adanya peraturan tentang tapak kavling tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menganggap peraturan tersebut tidaklah relevansi terhadap perkembangan jaman pada saat ini sehingga adanya zonasi peraturan tersebut hanyalah sebuah suatu kebijakan/ kewenangan/sebuah diskresi saja sesuai dengan tujuannya yang sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014). Bahwasannya diskresi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum sebagai akibat dari kekosongan atau kekaburan aturan hukum , mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.



## SARAN

Agar tercapai apa yang termaktub dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945, Perlu adanya zonasi pembatasan pemilikan atau penguasaan atas tanah ini agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan agar tidak timbul tanah terlantar.

Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA yang menentukan bahwa dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud, diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, haruslah bagaimana implementasinya sesuai koridor hukum yang telah di amanatkan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini harus mengeluarkan peraturan yang tegas mengenai pembatasan tanah hak milik non pertanian yang lebih komperhensif dan utuh yang bersifat mengikat serta memberikan sanksi tegas dalam pelaksanaannya, agar dapat mencegah dan menindak apabila ada golongan atau pihak-pihak yang menumpuk tanah-tanah hak milik non pertanian, hal ini menjadi latar belakang perlu dan pentingnya kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tapak di kabupaten suatu daerah yang bertujuan agar perorangan serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat saling memperhatikan batasan kepemilikan oleh seseorang terhadap tanah hak miliknya, sehingga dapat terlaksananya program *landreform* serta memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Pokok Agraria) yang ditelah diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdurrahman dalam Achmad Rubaie, *Tentang dan Sekitar UUPA*, alumni, bandung, 1984, hlm.227.

Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.19.

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007, hal.97.

A.V. Dicey, *Introduction To The Study Of The Constitution*, Cet 2, terjemahan dari Nurhadi, Nusamedia, Bandung, 1952, hal.254-255.

A.P. Parlindungan, *Permohonan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Menurut Pengaturan Yang Berkaitan*, Makalah Seminar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1996, hlm. 76-77.

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.73

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1235

\_\_\_\_\_, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003. hlm. 25

A.V. Dicey, *ibid*, hal.258

\_\_\_\_\_, *ibid*, hal.259

Arie Sukanti Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*.(Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2007). Hal. 24.

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan berkumpul ditinjau dari Perpektif UUD 1945*, Jakarta hlm.8

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan Jakarta, (selanjutnya disingkat Boedi Harsono I), h.365

\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. 9, (Jakarta: Djambatan, 2003),hal. 475.

Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung : Alumni, 1983), hal. 20-21.

Dikutip dari Buku Catatan Widhihandoko yang berjudul “*Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah*”

Diktat Hukum Agraria, Diktat Hukum Agraria,” *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*”, (Diktat), hal. 31.

\_\_\_\_\_,” *Garis Besar Hukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*”, (Diktat), hal. 30

Estelle Phillips, *Researching and Writing in Law*, Lawbook, Sidney, 2002, hal.164. dalam Rusdianto S, “*Prinsip Kesatuan Hukum Nasional dalam pembentukan produk hukum pemerintah daerah otonomi khusus atau sementara*”. Disertasi, logam pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

Firly Irhamdani, “*Analisis yuridis terhadap batas maximum kepemilikan hak milik non pertanian menurut hukum pertanahan nasional*”, tesis, magister kenotariatan, Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2012.



Herma Yulis dalam Achmad Rubaie, *Aspek-Aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan, Hukum Bisnis*, vol.10, Jakarta, 2000, hlm, 29, sebagaimana dikutip Sri Hajati dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang hokum pada fakultas hukum universitas air langga Surabaya *Berjudul Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional*, 2005, hlm. 2.

Herman Soesangobeng, *Sinkronisasi Peraturan Perundang – Undangan Mengenai Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Makalah disajikan pada seminar Pertanahan Nasional 2002 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta 16 Juli 2002.

\_\_\_\_\_, *Filosofi Adat dalam UUPA*, Makalah dipresentasikan dalam Sarasehan Nasional “*Peningkatan Akses Rakyat Terhadap Sumberdaya Tanah*”, Diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/BPN bekerjasama dengan ASPPAT, tanggal 12 Oktober 1998, di Jakarta, 1998, hal. 4.

H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoffdstukken van Administratief Recht*, Culemborg, Uitgeverij LEMMA BV, 1988, p. 56. Dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.70.

Irene Eka Sihombing, , *Segi-segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2005). Hal. 50.

John Rowls, *Theory Justice*, Harvard University Press, 1971 hal. 352

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, hal.265

Lihat Pasal 19 UUPA.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal.20.



Mudakir Iskandar Syah, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. (Jakarta: Jala Permata, 2007). Hal. 44.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal.95.

R. Soeprapto, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek*, (Jakarta: Mitra Sari, 1986), 21. hal. 69.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro Ekonomi, Cetakan Keenam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 33.

Sjahran.Basah.. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan* di Fakultas Hukum Unair Surabaya, hlm 3.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal.7.

Soedjono Dan H.Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.56

Soetomo, *Pembebasan Pencabutan Permohonan Hak Atas Tanah, Usaha Nasional*, Surabaya, 1984, hlm.91

SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hal.154.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak – Hak Atas Tanah*, Kencana Jakarta 2005 hal 5

\_\_\_\_\_.*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ),  
hal.30

\_\_\_\_\_.*Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, ( Jakarta: Kencana, 2010 ),,  
hal 19-20.

Wani Widjaja“*Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan penetapan batas maksimum pemilikan tanah pertanian sesudah berlakunya undang-undang nomor 56 (prp) tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian*”,universitas udayana, Bali tahun 2017

[www.hukumproperti.com/2013/11/06/asas-asas-hukum-agraria/com](http://www.hukumproperti.com/2013/11/06/asas-asas-hukum-agraria/com). dikutip pada tanggal  
4 Maret 2015 jam 10.00 WIB.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3)
- b.Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
- c.Pasal 7, Pasal 10, Pasal 17, UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) “Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak di perkenankan.
- d.Peraturan Kepala BPN RI No 1 tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, Dasar Hukum Risalah Pertimbangan Tapak Kavling.
- e.Perda Kabupaten Sleman No 19 tahun 2001
- f.Undang-Undang No.56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian dan Undang-Undang ini merupakan Induk pelaksanaan Landreform.
- g.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.6 tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal
- h.Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang penataan ruang

- i. PP No.38 Tahun 2007 tentang perijinan pemanfaatan ruang
- j. Peraturan pemerintah No.15 tahun 2010 tentang izin prinsip, izin lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Pemanfaatan Ruang Lainnya.
- k. Peraturan Kepala BPN RI No.1 tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang risalah pertimbangan tapak kavling.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 , Pasal 1 butir 10
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 butir 1

